

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023



KESBANGPOL
PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Rencana Aksi Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Sesuai dengan Rencana Kerja, Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar:

Tahun	Uraian	Pagu Dana (Rp)
2023	Belanja Operasi	24.644.927.377,15,-
	1.Belanja Pegawai	6.763.201.837,15,-
	2.Belanja Barang dan Jasa	7.581.725.540,00,-
	3.Belanja Hibah	10.300.000.000,00,-
	Belanja Modal	350.052.000,00,-
	Total Belanja	24.994.979.377,15,-

Anggaran tersebut di atas untuk melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang terbagi kedalam 2 (dua) Sasaran Utama dan 2 (dua) Sasaran Pendukung. Sasaran Pendukung tersebut untuk meningkatkan dan mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel dan Daftar Gambar v

BAB I. PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang I.1

 B. Dasar Hukum I.2

 C. Maksud dan Tujuan I.3

 D. Ruang Lingkup I.4

 E. Sistematika Penulisan I.4

BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

 A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... II.1

 B. Sumber Daya..... II.3

 C. Kinerja Pelayanan..... II.7

 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II.9

BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

 A. Visi dan Misi Provinsi LampungIII.1

 B. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahIII.3

 C. Indikator Kinerja Sasaran Renja Badan Kesbangpol
 Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023III.5

 D. Rencana Aksi Kinerja 2023III.6

BAB IV. PENUTUP..... IV.1

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

TABEL II.1	Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan	II.3
TABEL II.2	Perkembangan Alokasi APBD Tahun 2019-2023	II.4
TABEL II.3	Data Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung Sampai Dengan Desember 2022	II.5
TABEL III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	III.3
TABEL III.2	Tujuan dan Sasaran Pendukung Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	III.4
TABEL III.3	Indikator Kinerja Sasaran Utama Renja Tahun 2023	III.5
TABEL III.4	Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Renja Tahun 2023	III.6
TABEL III.5	Rencana Aksi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan I (Satu) Tahun 2023	III.7
TABEL III.6	Rencana Aksi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan II (Dua) Tahun 2023	III.11
TABEL III.7	Rencana Aksi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan III (Tiga) Tahun 2023	III.15
TABEL III.8	Rencana Aksi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan IV (Empat) Tahun 2023	III.19

Daftar Gambar

GAMBAR II.1	Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	II.2
-------------	--	------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh *stakeholder* yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5

tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan Tolok Ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan telah

dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023;

2. Sebagai upaya percepatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam RPJMD 2019-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator target kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023, proses penyusunan Evaluasi Rencana Aksi, keterkaitan antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan Program RKPD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

B. DASAR HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023.

D. RUANG LINGKUP

Mencakup proses penyusunan isi dokumen Rencana Aksi tahun 2023.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Memuat tugas dan fungsi serta struktur organisasi Badan kesbangpol Provinsi Lampung serta sumberdaya yang berada di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung antara lain: jumlah sumberdaya manusia (ASN), anggaran, serta sarana dan prasarana.

B. KINERJA PELAYANAN

Memuat pengukuran pencapaian indikator kinerja yang diuraikan dalam Tugas Pokok Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.

C. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

Berisikan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung serta peluang yang dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.

BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG

Memuat Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2019-2024.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah.

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS RENSTRA

Mengemukakan indikator sasaran capaian kinerja dan target yang akan dicapai.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

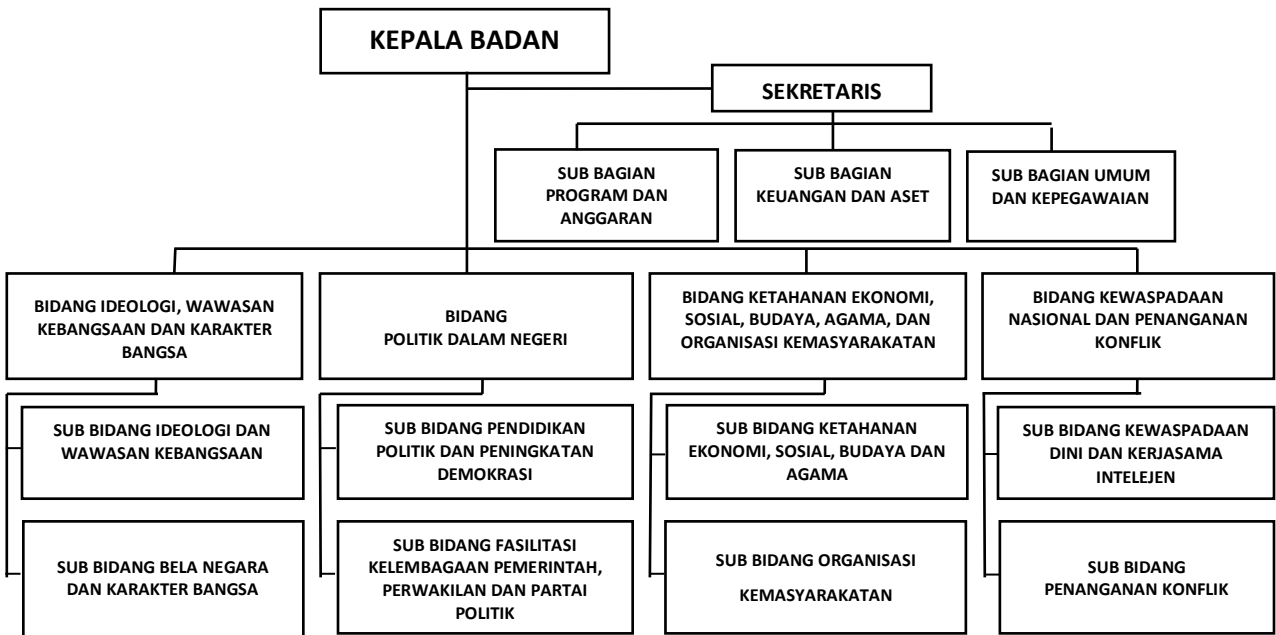
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan, teknis kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Derah Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
(Pergub Lampung Nomor: 56 Tahun 2019)



B. SUMBER DAYA

1. Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 7 jabatan struktural dan 10 Jabatan Fungsional sebagai sub koordinator berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu:

- 1) 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) 1 Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) 1 Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5) 10 Jabatan Fungsional selaku sub koordinator

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1
Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	12	4	16
3.	Strata 1	14	7	21
4.	D4	1	-	1
5.	Sarmu/D3	2	1	3
6.	SLTA	9	2	11
7.	SLTP	1	-	1
8.	SD	-	-	-
	Jumlah	39	14	53

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 30,18% berpendidikan S2 dan 39,62% berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan diploma empat kebawah. Namun, bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki

masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut:

- 1. Golongan IV : 14 Orang
- 2. Golongan III : 28 Orang
- 3. Golongan II : 11 Orang
- 4. Golongan I : 0 Orang

2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II.2
Perkembangan Alokasi APBD Tahun 2019-2023

Tahun	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
1	2	3	4
2019	Belanja Tidak Langsung	6.425.212.500,-	6.425.212.500,-
	Belanja Langsung	5.920.884.000,-	5.016.006.200,-
	Total Belanja	12.346.096.500,-	11.441.218.700,-
2020	Belanja Tidak Langsung	5.766.294.234,-	5.982.473.705,-
	Belanja Langsung	9.984.304.000,-	3.399.056.200,-
	Total Belanja	15.750.598.234,-	9.381.529.905,-
2021	Belanja Operasi	17.645.294.724,-	14.609.405.070,-
	Belanja Modal	183.228.600,-	149.155.000,-
	Total Belanja	17.828.523.324,-	14.758.560.070,-
2022	Belanja Operasi	18.702.596.826,-	20.138.692.777,15
	Belanja Modal	345.505.000,-	343.076.000,00

	Total Belanja	19.048.101.826,-	20.481.768.777.15
2023	Belanja Operasi	24.644.927.377,15	
	Belanja Modal	350.052.000,-	
	Total Belanja	24.994.979.377,15	

3. Sarana Pendukung

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung sejauh ini dirasa kurang untuk menunjang kinerja agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Tabel 2.3
Data Kondisi Sarana dan Prasarana
Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
Sampai dengan Desember 2022

No.	SARANA DAN PRASARANA	JML	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Empat				
	a. Jeep Daihatsu BE 880 AZ	1		Kurang baik	
	b. Mini Bus Toyota Kijang BE 1089 AZ	1	Baik		
	c. Mini Bus Nissan Pick Up BE 8204 BZ	1	Baik		
	d. Mini Bus Maven DX GLX BE 1471 BZ	1	Baik		
	e. Mitsubishi Pajero Sport BE 37	1	Baik		
	f. Toyota Avanza Seri V BE 1634 BZ	1	Baik		
2.	Kendaraan Roda Dua				
	Yamaha Jupiter MX BE 3258 CZ	1	Baik		
3.	Mesin ketik manual	10	3 baik	7 kurang baik	
4.	PC Unit Komputer	27	20 baik	7 kurang baik	
5.	Printer	21	19 baik	2 kurang baik	
6.	Laptop/Notebook	21	12 Baik	9 kurang baik	
7.	Scanner	1	Baik		
8.	AC	41	31 Baik	10 kurang baik	
9.	Overhead Projektor	5	2 Baik	3 kurang baik	

10.	Kursi Pejabat Ess. III	10	Baik		
11.	Kursi putar	133	70 Baik	63 Kurang baik	
12.	Kursi lipat	121	54 Baik	67 Kurang baik	
13.	Sofa	3	Baik		
14.	Meja kerja pegawai non struktural	3	Baik		
15.	Meja ½ biro	58	50 Baik	8 Kurang Baik	
16.	Meja komputer	6	4 Baik	2 Kurang baik	rusak
17.	Meja rapat	26	Baik		
18.	Meja piket	1	Baik		
19.	Lemari besi/metal	12	10 Baik	2 Kurang baik	
20.	Rak besi/metal	6	Baik		
21.	Rak kayu	18	Baik		
22.	Filling besi/metal	51	11 Baik	40 Kurang baik	
23.	Brankas	10	5 Baik	5 Kurang baik	
24.	Papan nama instansi	1	Baik		
25.	Papan pengumuman	4	2 Baik	2 Kurang baik	
26.	White board	6	5 Baik	1 Kurang baik	
27.	Peta	8	5 Baik	3 Kurang baik	
28.	Televisi	13	6 Baik	7 Kurang baik	
29.	Sound system	7	3 Baik	4 Kurang baik	
30.	UPS	1	Baik		
31.	LCD	2	1 Baik	1 Kurang baik	
32.	Stabilisator	2		2 kurang baik	
33.	Kamera film	3	Baik		
34.	Kamera + Attachmen	5	3 Baik	2 Kurang baik	
35.	Handycam	6	2 Baik	4 Kurang baik	rusak
36.	Handy Talkie	6		Kurang baik	
37.	Faximile	4	2 Baik	2 Kurang baik	
38.	Stabilizer	7	1 Baik	6 Kurang baik	
39.	Bel listrik	1	Baik		
40.	Tower air	1	Baik		
41.	Mesin pompa air jet pump	1	Baik		
42.	Mesin pompa air pendorong	2	Baik		
43.	Tutup mesin pompa dan pendorong air	3	Baik		
44.	Hordeng dan perelengkapannya	380m /120m	Baik		
45.	Buku Perundang-undangan	72	Baik		
46.	Dispenser	7	2 Baik	5 Kurang baik	
47.	Spring bed	7	Baik		
48.	Absensi sidik jari	1	Baik		

49.	CCTV	8	Baik		
50.	Vacum Cleaner	1	Baik		

C. KINERJA PELAYANAN

Pencapaian kinerja pelayanan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator dengan kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas.

Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Satuan Kerja. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 diuraikan kedalam 4 (empat) tugas pokok disamping tugas pokok, yaitu:

- 1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Proses pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, sarasehan dan dialog-dialog dengan peserta terdiri dari Ormas, Orpol, Elemen masyarakat, tenaga pendidik, mahasiswa, pelajar, pemuda dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dalam Pencegahan Radikalisme;
 - b. Sosialisasi Bela Negara;
 - c. Kemah Bela Negara;
 - d. Upacara Hari Bela Negara.

Output dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkembangkan rasa solidaritas, cinta tanah air dan kegotongroyongan pada seluruh komponen masyarakat untuk menangkal radikalisme dan konflik sosial di Provinsi Lampung.

2. Politik Dalam Negeri

Proses pembinaan bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui Rapat-rapat Koordinasi, Road Show, Rakernis, Sosialisasi, diskusi lintas partai dan pemantauan pemilu dan Pemilukada meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Raker Pokja IDI;
- b. Sosialisasi UU Pemilu bagi Pemilih Pemula;
- c. Desk Pemilu dan Pilkada;
- d. Bimtek Bantuan Keuangan kepada Parpol;
- e. Monitoring perkembangan politik di Provinsi Lampung.

Output dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya indeks demokrasi indonesia (IDI) Provinsi Lampung.

3. Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Proses Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, Fasilitasi Organisasi dan Elemen Masyarakat, Sosialisasi, Dialog dan Pembinaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Raker FKUB;
- b. Sosialisasi P4GN;
- c. Pembinaan Pondok Pesantren.

Output kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang cinta tanah air dan bangsa, wawasan kebangsaan dan bahaya Radikalisme di Provinsi Lampung.

4. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Proses Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi/Rapat Kerja, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Raker FKDM Provinsi Lampung;
- b. Raker Timdu Penanganan Konflik;
- c. Sosialisasi Penanganan Konflik;
- d. Raker Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan WNA di Provinsi Lampung;
- e. Rapat Kerja Forkopimda.

Output kegiatan tersebut adalah kebijakan tentang deteksi dini, cegah dini dan penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1. Tantangan

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan harmonisasi lintas agama perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

- c. Masih terdapat warga negara asing yang belum melaporkan keberadaannya.
- d. Pengawasan organisasi/lembaga asing yang melaksanakan kegiatan di daerah.
- e. Sebagai dampak mudahnya proses pembentukan orkemas sehingga masih banyak yang belum melaporkan keberadaannya.
- f. Peran elemen masyarakat mitra pemerintah (FKUB, FPK, FKDM, PPWK) dalam pembinaan ideologi, wasbang dan poldagri serta deteksi dini, cegah dini potensi konflik sosial dan keagamaan di daerah.
- g. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh agama.
- h. Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan.

2. Peluang

- a. Monitoring kegiatan organisasi/lembaga asing di daerah.
- b. Pemberdayaan elemen masyarakat mitra pemda dan organisasi kemasyarakatan dalam memelihara keutuhan NKRI, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta deteksi dini, cegah dini potensi konflik sosial dan keagamaan di daerah.
- c. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan massa media, serta lembaga dan organisasi terkait.
- d. Memberi dukungan dalam upaya menumbuhkan kembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

- e. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.
- f. Meningkatnya peran lembaga, instansi, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta elemen/lembaga masyarakat mitra pemerintah daerah dalam penanganan Narkoba dan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat potensi konflik dan penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Untuk mencapai visi “Rakyat lampung Berjaya” tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019-2024 adalah:

- Misi - 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi - 2 : Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- Misi - 3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- Misi - 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- Misi - 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- Misi - 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus mendukung Misi pertama yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai dengan melaksanakan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan agenda RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu:

1. Lampung Merawat Indonesia, dengan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
2. Lampung menuju bebas narkoba, dengan mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.

Dalam melaksanakan misi ke-satu dan agenda kerja tersebut diatas, pokok-pokok program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan media massa, serta lembaga dan organisasi terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya;
4. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu: "Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai” dengan cara mewujudkan Provinsi Lampung yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019–2024, yaitu meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat, maka ditetapkan sasaran jangka menengah, yaitu meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator tujuan/sasaran:

- 1. Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.
- 2. Meningkatnya penduduk yang menggunakan hak pilih di Provinsi Lampung.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			
				2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	80	80	87,50	90

		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72,25	72,25	72.75	73
--	--	---	--	-------	-------	-------	----

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sasaran yang bersifat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran tersebut adalah: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan. Capaian kualitas dan kapasitas kelembagaan sangat terkait dengan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta sarana dan prasarana yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah dengan penerapan absensi elektronika dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung. Dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.2

***Tujuan dan Sasaran Pendukung Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung 2021-2024***

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memperkuat kelembagaan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan.	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Badan Kesbangpol Daerah per-tahun	90%	92%	94%	96%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran.	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran.	60%	65%	70%	75%

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Indikator Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel III.3
Indikator Kinerja Sasaran Utama Renja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	4 Program	3.993.686.600,00,-	15,97%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	1 Program	1.092.819.000,00	4,37%

Tabel III.4
Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Renja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan.	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Badan Kesbangpol Daerah per-tahun.	1 Program	19.358.421.177,15,-	77,44%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran		350.052.000,00,-	1,40%

D. RENCANA AKSI KINERJA 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengelola anggaran tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 24.994.979.377,15,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 24.644.927.377,15,- dan belanja Modal sebesar Rp. 350.052.000,- dengan rencana aksi kegiatan sebagai tabel berikut:

RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2023

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/T W	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17		18	19	20	21
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	1	15%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	10%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	3 Dok	1	Renja 2023	v			
													2	Rencana Aksi 2022	v			
													3	KUA PPAS 2023	v			
													4	Anggaran Reponsif Gender (ARG)	v			
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	2 Dok	1	RKA Tahun 2023	v			
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-						
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	1	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3 Dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	v												
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	5 Dok	1	Evaluasi Renja TW IV 2021	v												
				2	LKj Tahun 2021	v												
				3	LPPD-LKPJ Tahun 2021	v												
				4	Evaluasi Renja Tahun 2022	v												
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan																	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	3 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v												
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1	39 lembaga	1	Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan	v												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	3 Dok	1	Pelaksanaan akutansi SKPD	v												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	4 Lap.	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v												
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset																	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1 lap.	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v												
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2 Lap.	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v												
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1	1 org/kl	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v												
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	30 org/kl	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	v												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	30 org/kl	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v												
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum																	

									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	3 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v				
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	-							
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v				
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	3 lap.	1	Fasilitasi kunjungan tamu	v				
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v				
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	1	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial	v				
									Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	1	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v				
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	3 bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v				
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah									
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	-							
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	-							
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	4 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v				
								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	1	5%			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	12 dok	1	Program Kerja PPWK	v				
							2	Program Kerja GNRM					v						
							3	Program Kerja FPK					v						
							1	6 Dok			1	Sosialisasi GNRM	v						
											2	Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila	v						
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	720 org	1	Rakor Bela Negara, Karbang, BTI dan Kewarganegaraan	v			
								Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	3 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v					
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	1	5%			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				

2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	1	15%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	1	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik							
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	4 Dok	1	Penyusunan Program Kerja	v		
									Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	3 Dok	1	Penyusunan Kebijakan program/kegiatan	v		
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	440 org	1	Sosialisasi Pemilih Pemula	v		
													2	Sosialisasi Netralitas ASN	v		
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	150 org	1	Rapat Tim Banpol	v		
													2	Rapat Tim PAW	v		
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	4 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v		

RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2023

No.	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17		18	19	20	21
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	II	25%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II	25%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	II	-						
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	II	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	II	-						
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	II	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	II	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	II	3 Dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		v		
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	II	2 Dok	1	Evaluasi Renja Tahun 2022		v		
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan								
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	II	3 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN		v		
									Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	II	-						
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	II	3 Dok	1	Pelaksanaan akutansi SKPD		v		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	II	4 Lap.	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran		v		
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset								
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	II	-						
									Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	II	2 Lap.	1	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		v		
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian								
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	II	2 org/kl	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		v		
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	II	50 org/kl	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		v		
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	II	30 org/kl	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN		v		
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum								
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	II	3 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/alat listrik		v		
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	II	16 paket	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		v		

									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	II	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga		v		
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	II	3 lap.	1	Fasilitasi kunjungan tamu		v		
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	II	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan		v		
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	II	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial		v		
									Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	II	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		v		
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	II	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone		v		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	II	3 bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan		v		
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah								
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	II	2 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		v		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	II	850 m2	1	Pemeliharaan Gedung Kantor		v		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	II	7 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		v		
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	II	10%						
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	-						
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	2 Dok	1	Seleksi		v		
													2	Upacara Hari Lahir Pancasila		v		
													3	Rapat Diklat		v		
													4	Rapat Seleksi		v		
													5	Rapat Kab/Kota		v		
													6	Sosialisasi Bela Negara		v		
													7	sosialisasi pencegahan ekstremitisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi generasi muda		v		
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	-						
										Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	II	4 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		v		
										Program Pemberdayaan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	II	10%						
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	II	20%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	II	10%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik							
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	-					
									Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	3 Dok	1	Penyusunan Kebijakan program/kegiatan		v	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	225 org	1	Sosialisasi Pemilih Pemula		v	
													2	Sosialisasi Netralitas ASN		v	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	200 org	1	Rapat Tim Banpol		v	
													2	Pembinaan Kepada Parpol		v	
													3	Rapat Tim PAW		v	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	4 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		v	

RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2023

No.	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17		18	19	20	21
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	III	20%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	III	25%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	III	-						
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	III	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	III	-						
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	III	2 Dok	1	DPA Tahun 2023			v	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	III	-						
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	III	3 Dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022			v	
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	III	2 Dok	1	Evaluasi Renja Tahun 2022			v	
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan								
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	III	3 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN			v	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	III	-						
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	III	3 Dok	1	Pelaksanaan akuntansi SKPD			v	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	III	4 Lap.	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran			v	
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset								
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	III	-						
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	III	2 Lap.	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			v	
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian								
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	III	2 org/kl	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			v	
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	III	44 org/kl	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			v	
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	III	30 org/kl	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN			v	
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum								
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	III	3 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik			v	
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	III	8 paket	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			v	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	III	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga			v	

									Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	III	3 lap.	1	Facilitasi kunjungan tamu			v		
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	III	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan			v		
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	III	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial			v		
									Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	III	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah			v		
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	III	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone			v		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	III	3 bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan			v		
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah									
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	III	1 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			v		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	III	-							
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	III	7 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			v		
						III	10%		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat									
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	-							
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	6 Dok	1	Diklat			v		
														2	Pengukuhan			v	
														3	Penaikan Bendera dan penurunan bendera			v	
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	180 org	1	Rakor PPWK			v		
														2	Rakor FPK			v	
														3	Rakor GNRM			v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	III	4 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			v		
						III	10%		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung									
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	III	165 org	1	Raker Tim Pengawas Ormas			v		
														2	Pembinaan Ormas			v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	III	5 lap.	1	Pembuatan Aplikasi STLKO (Surat Tanda Lapor Keberadaan Ormas) dan Laporan Kegiatan			v		

					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	III	10%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
										III	640 org	1	Rapat Tim Terpadu P4GN				v		
												2	Sosialisasi Perda dan Pergub Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika				v		
												3	Pembinaan Keagamaan				v		
												4	IPWK bagi Ponpes				v		
										III	5 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				v		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	III	10%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi									
										III	1 dok.	1	Menyusun Pemetaan Wilayah Rawan Konflik				v		
										III	380 org	1	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme, terorisme dan radikalisme				v		
										III	170 org	1	Rapat Stabilitas dan Kewaspadaan Dini di Daerah				v		
										III	5 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				v		
										III	-								
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	III	17.75%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	III	10%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik									
										III	-								

									Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	III	-						
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	225 org	1	Sosialisasi Pemilih Pemula			v	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	240 org	1	Silaturahmi Banpol			v	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	5 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			v	

RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2023

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN												
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/T W	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17		18	19	20	21									
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	IV	27.5%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IV	15%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	IV	3 Dok	1	Perubahan Renstra 2019-2024				v									
														2	Perubahan Renja 2022				v								
															3	Perubahan Rencana Aksi 2022				v							
										Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	IV	-														
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	IV	-														
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	IV	-														
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	IV	2 dok	1	DPA Perubahan Tahun 2022											v	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV	3 Dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022											v	
										Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	IV	2 Dok	1	Evaluasi Renja Tahun 2022											v	
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan																
										Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	IV	3 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN												v
										Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	IV	-														
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	IV	3 Dok	1	Pelaksanaan akutansi SKPD												v
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	IV	4 Lap.	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran												v
										Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset																
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	IV	1 lap.	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												v
										Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	IV	2 Lap.	1	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												v
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian																
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	IV	1 org/kl	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai												v
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	IV	30 org/kl	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan												v
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IV	30 org/kl	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN												v
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum																
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	IV	3 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik											v									
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	IV	19 paket	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				v									

									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	IV	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga				v	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	IV	3 lap.	1	Fasilitasi kunjungan tamu				v	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	IV	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan				v	
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	IV	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial				v	
									Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	IV	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah				v	
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	IV	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone				v	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	IV	3 bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan				v	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah									
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	IV	-							
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	IV	-							
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	IV	13 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				v	
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	IV	5%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	-		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	350 org	1	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Upacara Hari Bela Negara			v	
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	-		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
										Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	IV	3 lap.	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			v	
									Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	IV	5%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	IV	-		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					

									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	IV	2 Lap.	1	Pembuatan Aplikasi STLKO (Surat Tanda Lapor Keberadaan Ormas) dan Laporan Kegiatan				v
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	IV	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya								
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	IV	360 org	1	Pembinaan Pondok Pesantren				v
													2	Pembinaan Keagamaan				v
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	IV	2 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				v
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	IV	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
									Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	IV	-						
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	IV	-						
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	IV	170 org	1	Rapat Koordinasi RAD PKS				v
													2	Rapat Stabilitas dan Kewaspadaan Dini di Daerah				v
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	IV	2 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				v
									Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	IV	1 dok.	1	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan				v
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	IV	20%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	IV	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik								

									Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-					
									Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-					
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	870 org	1	Rapat FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			v
						2	Rapat Pokja IDI								v		
						3	Rakor perkembangan Politik								v		
						4	Sosialisasi Pemilih Pemula								v		
						5	Sosialisasi Netralitas ASN								v		
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-						
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	2 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			v	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran, serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melaksanakan 2 (dua) Sasaran Utama dan 2 (dua) Sasaran Administrasi sebagai pendukung Visi Provinsi Lampung 2019-2024 **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Dari 2 (dua) sasaran tersebut didukung oleh 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 24.994.979.377,15,-

Semoga Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sebagai bagian rencana jangka menengah dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001